

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil, juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersediannya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka sistem ekonomi serta sikap dari output itu sendiri (Irawan dan Suparmoko, 1998 dalam Dewa Made, 2015).

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi disuatu negara membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari pembangunan ekonomi yaitu melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pembangunan. Dampak negatif dari pembangunan ekonomi yaitu adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik

mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadaan tersebut. Adanya pembangunan selain memberikan dampak positif juga memberi dampak negatif terutama ditunjukkan oleh berbagai masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius bagi bangsa Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang pada gilirannya merupakan penawaran tenaga kerja yang berlebihan, sedangkan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja sangat terbatas. Hal ini akan menambah angka pengangguran serta akan menimbulkan keresahan sosial (Mudrajad Kuncoro, 1994 dalam Hariyanto, 2003).

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan pembangunan-pembangunan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Di dalam pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu dan berarti jamak akan mencakup semua bidang. Dengan demikian pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat bangsa tersebut (Dewa Made, 2015).

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat hanya dilakukan dengan berbekal tekad yang membaja dari seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi lebih dari itu harus didukung pula oleh ketersediaan sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal yang produktif. Dengan kata lain, tanpa adanya daya dukung yang cukup kuat dari sumber daya ekonomi yang produktif, maka pembangunan ekonomi sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi ini oleh negara-negara dunia ketiga tidaklah sama. Ada negara yang memiliki kelebihan pada jenis sumberdaya ekonomi tertentu, ada pula yang kekurangan (Rara Sonia dkk, 2015).

Pada banyak negara dunia ketiga, yang umumnya memiliki tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif masih rendah, mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi memang sangat mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara industri maju. Oleh karena masih relatif lemahnya kemampuan partisipasi swasta domestic dalam pembangunan ekonomi, mengharuskan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan pada sector informal (Suparmoko, 1986:120 dalam Reni Pratiwi, 2012).

Lapangan kerja pada sektor formal menjadi prioritas bagi para tenaga kerja. Namun akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, banyak terjadi Putus Hubungan Kerja (PHK) pada sektor

formal ini. Untuk itu perlu dikembangkan lapangan kerja pada sektor informal yang justru kelihatannya sektor ini tidak mampu menampung tenaga kerja seperti harapan kita, namun pada kenyataannya sektor informal bisa menjadi penyelamat bagi masalah ketenagakerjaan yang kita hadapi. Banyak bidang informal yang berpotensi untuk diangkat dan digali menjadi salah satu bidang usaha yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan keluarga sekaligus dapat menyerap tenaga kerja. Usaha berdagang merupakan salah satu alternatif lapangan kerja informal, yang ternyata banyak menyerap tenaga kerja (Reni Pratiwi, 2012).

Seperti yang kita ketahui bahwa lapangan pekerjaan di sektor formal daya serapnya terbatas, oleh karena itu perlu diarahkan ke sektor informal. Penyerapan tenaga kerja informal yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor formal terjadi hampir di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan betapa besar peranan masyarakat Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga setidaknya dapat menarik para anggota keluarga demi sedikit mengurangi pengangguran. Selain itu, untuk memulai kegiatan usaha di sektor informal tidak terlalu dituntut persyaratan ketat seperti keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi. Adanya pertumbuhan yang tidak seimbang antara tingginya angkatan kerja dengan keterbatasan lapangan kerja mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, penciptaan lapangan pekerjaan di sektor informal perlu mendapatkan perhatian dan tampaknya sektor ini sedikit banyak akan dapat ikut

memecahkan masalah ketenagakerjaan dengan segala implikasinya terhadap pembangunan yang ideal dari suatu daerah. Sektor informal, termasuk sektor perdagangan, di samping mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi khususnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Reni Pratiwi, 2012).

Di D.I Yogyakarta kontribusi sektor perdagangan di Tahun 2013 mencapai 5,80% dari total nilai PDRB kota Yogyakarta. Kontribusi sector-sector dalam PDRB D.I Yogyakarta tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 1.1 di bawah ini:

TABEL 1.1
Distribusi PDRB D.I Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas
Harga Konstan Tahun 2012-2013
 (%)

No	Lapangan Usaha	2012	2013
1	Pertanian	4,19	0,63
2	Pertambangan dan Penggalian	1,98	4,92
3	Industri Pengolahan	-2,28	7,81
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	7,11	6,54
5	Bangunan	5,97	6,07
6	Perdagangan Besar & Eceran	6,02	5,80
7	Hotel	15,55	8,83
8	Restoran	5,61	6,01
9	Pengangkutan & Komunikasi	6,21	6,30
11	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9,95	6,23
12	Jasa-jasa	7,09	5,57
	PDRB	5,32	5,40

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2014

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 sektor perdagangan 6,02% menduduki urutan ke enam dalam pembentukan PDRB kota Yogyakarta. Dan pada tahun 2013 distribusi PDRB D.I Yogyakarta pada sektor perdagangan terjadi penurunan sebesar 5,80% menempati urutan ke delapan, dan pada urutan pertama adalah sektor hotel yaitu sebesar 8,83%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan sector perdagangan merupakan salah satu sektor yang

memberikan sumbangan PDRB yang cukup potensial bagi D.I Yogyakarta.

Usaha berdagang merupakan bagian dari sektor informal yang mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pedagang pasar merupakan salah satu kelompok dari sektor informal yang perlu dibina, dibimbing, dan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mampu meningkatkan pendapatannya. Keberadaan mereka sebagai pedagang sangat diperlukan oleh masyarakat. Usaha ini memang cukup menarik dilihat dari sudut pandang kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja serta menyediakan barang dan jasa dengan harga murah dalam lingkup usaha yang mencegah merajalela pengangguran dan keresahan sosial. Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern dimana konsumen bisa berbelanja lebih efisien. (Muchamad L, 2004 dalam Bambang Prayuda dkk., 2014).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota batik yang ada di Indonesia. Yogyakarta telah resmi dinobatkan sebagai kota batik dunia oleh Dewan Kerajinan Dunia atau (World Craft Council/WCC), pada peringatan 50 tahun organisasi di Dongyang, provinsi Zhejiang, Tiongkok, pada 18 – 23 Oktober 2014. Batik sebagai karya tradisional Indonesia, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Yogyakarta. Selain memiliki

seni tinggi serta sejarah tak ternilai, batik telah mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat yogyakarta, pusat penjualan batik bisa ditemukan disepanjang jalan malioboro dan juga pasar beringharjo (www.rri.co.id, 2014).

Yogyakarta merupakan salah satu tempat wisata belanja kain batik yang terkenal di Indonesia. Malioboro adalah salah icon sekaligus destinasi wisata utama di kota yogyakarta. Sepanjang jalan malioboro banyak sekali ditemukan pedagang yang menjual batik. Di malioboro juga terdapat pasar yang sering dikunjungi oleh masyarakat dan wisatawan yaitu pasar beringharjo. Sebagai pasar tradisional kelas 1, pasar beringharjo memiliki layanan transaksi ekonomi berskala nasional. Berbagai jenis kebutuhan seperti sayuran, buah-buahan, peralatan rumah tangga, jajanan pasar, makanan tradisional, hingga benda-benda kuno dijual di pasar beringharjo. Namun demikian citra yang kuat melekat pada pasar beringharjo adalah sebagai pusat penjualan batik yang berupa lembaran kain maupun pakaian jadi. Batik menjadi etalase utama di pasar beringharjo. Pulahan los dengan ratusan pedang batik menjadi pengisi bagian depan pasar. Begitu kuatnya citra pasar beringharjo sebagai sentra pasar pedagang batik membuat banyak orang termasuk wisatawan menjadikan belanja batik sebagai agenda utama jika berkunjung ke yogyakarta atau malioboro (Kompasiana.com 2015).

Perdagangan batik di Yogyakarta memiliki peranan yang besar, tidak hanya dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi juga karena perannya

dalam mendukung sektor-sektor lain seperti pariwisata, perindustrian, dan sebagainya. Salah satu bagian yang terpenting atau instrument dari sektor perdagangan adalah pasar. Dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk menganalisis pedagang batik yang ada di pasar tradisional kota Yogyakarta dan non pasar di kota Yogyakarta.

Para pedagang batik sering dihadapkan pada persoalan tentang bagaimana mencapai keberhasilan usaha melalui optimalisasi peningkatan keuntungan yang dituangkan dalam pemilihan kombinasi dari beberapa variabel keputusan. Banyak faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan pedagang, termasuk diantaranya adalah modal kerja, modal awal usaha, lama usaha, dan jumlah karyawan.

Untuk itulah, dengan diketahuinya pengaruh dari keenam variabel tersebut terhadap pedagang, diharapkan mereka dapat mengembangkan usahanya dengan mengambil kebijaksanaan yang tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG BATIK KAWASAN MALIOBORO D.I YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modal awal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta?

2. Bagaimana modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta?
3. Bagaimana lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta?
4. Bagaimana jumlah karyawan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal awal usaha terhadap pendapatan pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyediaan barang usaha terhadap pendapatan pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah karyawan terhadap pendapatan pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak maupun instansi terkait terhadap hasil penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka menata dan mempertahankan eksistensi Pedagang Batik di D.I Yogyakarta.

2. Bagi Pedagang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pedagang batik Kawasan Malioboro Yogyakarta upaya melakukan pengembangan usaha dalam berdagang.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lingkupnya lebih luas dan lebih mendalam.

4. Bagi Pembaca

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca tentang kegiatan dan perkembangan usaha batik di D.I Yogyakarta.